

Pendidikan Karakter Untuk Generasi Muda Pasca Konflik Sosial Ambon Peran PKn

Laros Tuhuteru

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura Ambon, Indonesia

(Diterima 11-04-2020; Disetujui 28-05-2020)

e-mail: larostuhuteru@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk memahami masalah secara lengkap mengenai pendidikan karakter generasi muda pasca konflik sosial dan peran PKn, penulis dapat menggunakan metode wawancara, terutama terhadap beberapa orang informasi kunci yang ditentukan secara sengaja sesuai kebutuhan penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara *purposive* dan data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa pola pendidikan karakter generasi muda pasca konflik sosial Ambon peran PKn dalam membina karakter generasi muda secara inovatif sesuai dengan formatnya, sehingga para guru merasa keleluasan untuk menentukan pilihan metode pembelajaran PKn benar-benar membina dan membentuk watak karakter generasi muda yang demokratis, sikap menghargai orang lain dan sadar akan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara pasca konflik sosial Ambon. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah, para guru, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh agama di Ambon untuk membina generasi muda saat ini diarahkan pada pengembangan potensi dan kreativitas diri melalui pendidikan karakter dalam Pembelajaran PKn serta budaya lokal diantaranya seperti: budaya *pela gandong*, *masohi*, *makan patita*, *ale rasa beta rasa*, *potong di kuku rasa di daging*, dan *laeng lia laeng*, *laeng sayang laeng*, *laeng kalesang laeng*. Di kalangan generasi muda Ambon.

Kata Kunci: Karakter Generasi Muda, Konflik Sosial, Pendidikan Kewarganegaraan

ABSTRACT

The purpose of this study is to understand the complete problem regarding the character education of young people after social conflict and the role of Civics, the author can use the interview method, especially for some key information that is deliberately determined according to the needs of this study. This research is descriptive using a qualitative approach with case study methods, data collection techniques through in-depth interviews, direct observation, and documentation studies. Informants were selected purposively and the research data were analyzed qualitatively. The results of the study found that the pattern of character education for young people after the Ambon social conflict in the role of Civics in fostering the character of young people in an innovative manner in accordance with the format, so that teachers feel free to determine the choice of teaching methods of PKn really foster and shape the character of a democratic young generation, respect for others and aware of the life of the nation and state community after the Ambon social conflict. So it can be concluded that the government, teachers, community leaders, traditional leaders, and religious leaders in Ambon to foster the young generation are now directed at developing their potential and creativity through character education in Civics Learning and local culture such as: *pela gandong*, *masohi* culture, *eat patita*, *taste beta ale*, *cut in the taste nails in meat*, and *laeng lia laeng*, *laeng dear laeng*, *laeng kalesang laeng*. Among the younger generation of Ambonese.

Keywords: Young Generation Character, Social Conflict, and Citizenship Education

PENDAHULUAN

Ambon sebelum terjadinya konflik sosial pada tahun 1999 memiliki penataan kota rapi, dengan lingkungan yang bersih, hingga mendapat julukan Ambon manis, yang artinya manis atau indah. Karena itu, Ambon pernah beberapa kali mendapatkan Adipura penghargaan sebagai kota yang bersih. Problema sosial kota-kota besar seperti tuna wisma, kaki lima, pengamen-pengemis, sampah dan tindakan kriminal jarang dijumpai. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sebuah program pendidikan perlu menciptakan iklim yang kondusif untuk mendukung proses belajar dan mendidik warga negara muda (siswa) melalui proses belajar kondusif dan demokratis. Lingkungan yang damai dan menyenangkan adalah sangat kondusif untuk memfasilitasi agar terjadinya proses belajar yang lebih baik. Sebaliknya konflik dan kekerasan dalam kehidupan di sekolah maupun masyarakat memberikan dampak negatif terhadap proses belajar siswa. Secara imperatif pendidikan karakter bukanlah hal baru dalam sistem pendidikan nasional kita karena tujuan pendidikan nasional termuat dalam undang-undang pendidikan yang pernah berlaku (UU 4/1950; 12/1954; 2/89) dengan rumusan yang berbeda secara substantif memuat pendidikan karakter. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional komitmen tentang Pendidikan Karakter termuat dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa “ Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab,”

Di lain pihak, Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang membentuknya berdasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik atau golongannya sesuai motto Bhineka Tunggal Ika.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang cerdas, trampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. PKn semestinya mendidik siswa atau generasi muda untuk berkarakter baik dan mampu memecahkan masalah secara demokratis, termasuk memecahkan masalah konflik mereka sendiri. Dengan demikian, pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peran penting dalam menyediakan pendidikan resolusi konflik. Maka seiring dengan Pendidikan Karakter pada hakikatnya ingin membentuk individu menjadi seorang pribadi bermoral yang dapat menghayati kebebasan dan tanggung jawab, dalam relasinya dengan orang lain dan dunianya di dalam komunitas pendidikan. Komunitas pendidikan ini bisa memiliki cakupan lokal, nasional, maupun internasional (antar-negara). Dengan demikian pendidikan karakter senantiasa mengarahkan diri pada pembinaan individu bermoral, cakap mengambil keputusan dan trampil dalam perilakunya, sekaligus mampu berperan aktif dalam membangun kehidupan bersama. Singkatnya bagaimana membentuk individu yang menghargai kearifan nilai-nilai lokal sekaligus menjadi warga negara dalam masyarakat global dengan berbagai macam nilai yang menyertainya. Selain itu Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu membelajarkan siswa untuk memecahkan masalah-masalah sosial, bukan pembelajaran konvensional yang hanya menuntut siswa untuk menghafal fakta-fakta, yang hanya menggunakan metode ceramah yang membosankan siswa, ataupun pendidikan yang hanya sekedar mewariskan nilai-nilai lama tanpa dikaji secara kritis, dan juga bukan pendidikan yang hanya menekankan penguasaan disiplin ilmu dan pengembangan intelektualisme. Dengan meminjam tipologi tradisi *social studies* dari Barr, Barth, dan Shermis (1978), Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu membelajarkan siswa untuk memecahkan masalah-masalah sosial, termasuk konflik-konflik sosial yang bertumbuh pada tradisi *social studies* sebagai *reflective inquiry* yang dikembangkan Hunt dan Metcalft. Dalam membina karakter generasi muda, pendidikan memiliki peran penting khususnya di Ambon. Pendidikan formal dapat mengembangkan program pendidikan yang secara khusus dirancang untuk mendidik para siswa untuk hidup bersama secara damai untuk melatih mereka menyelesaikan konflik sosial.

Karakter dapat diterjemahkan dalam konsep akademis, karakter (*character*) memiliki makna substantif dan proses psikologis yang sangat mendasar. Lickona, (1992: 50) merujuk pada konsep *good character* yang dimukakan oleh Aristoteles menyebutnya sebagai *the life of right conduct- right conduct in relation to other persons and in relation to oneself*". Dengan kata lain karakter dapat kita maknai sebagai kehidupan berperilaku baik/ penuh kebajikan, yakni perilaku baik terhadap pihak lain (Tuhan Yang Maha Esa, manusia, dan alam semesta) dan terhadap diri sendiri. Dalam dunia modern ini, dikatakan Lickona (1991) lebih lanjut, bahwa kita cenderung melupakan *the virtuous life* atau kehidupan yang penuh dengan kebajikan, termasuk didalamnya *self oriented virtuous* atau kebajikan terhadap diri sendiri, seperti *self control and moderation* atau pengendalian diri atau kesabaran; dan *other-oriented virtuous* atau kebajikan terhadap orang lain, seperti *generosity and compassion* atau kesediaan berbagai dan merasakan kebaikan.

Secara substantif karakter terdiri atas 3 (tiga) yang satu sama lainnya saling berkaitan, yakni *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral behavior*. Ditegaskan lebih lanjut oleh Lickona (1991: 51) bahwa karakter yang baik (*good karakter*) terdiri atas proses psikologis *knowing the good, desiring the good, and doing the good-habit of the mind, habit of the heart, and habit of action*. Ketiga substansi dan proses psikologis tersebut bermakna pada kehidupan moral individu. Dengan kata lain, karakter kita maaknai sebagai kualitas pribadi yang baik, dalam arti tahu kebaikan, maupun berbuat baik, dan nyata berperilaku baik, yang secara koheren memancar sebagai hasil dari olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa.

Setiap negara-bangsa (*nation-state*) yang ingin tetap eksis selalu mendidik rakyatnya menjadi warganegara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*). Oleh karena itu masyarakat sangat mendambakan generasi mudanya dipersiapkan untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Keinginan tersebut lebih tepat disebut sebagai perhatian yang terus tumbuh, terutama dalam masyarakat demokratis. Banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa tak satu pun negara, termasuk Indonesia, telah mencapai tingkat pemahaman dan penerimaan terhadap hak-hak dan tanggung jawab di antara keseluruhan warganegara untuk menyokong kehidupan demokrasi konstitusional (Budimansyah, 2008: 11-12). Generasi muda, diharapkan dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab sebagai mana dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter generasi muda serta peradaban bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab.

Hal tersebut tidak terlepas dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang diimplementasikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan yang mempunyai tanggung jawab untuk membentuk warga negara yang baik. Namun, demikian masih ditemukan berbagai kendala. Kendala dan keterbatasan tersebut menurut Winataputra dan Budimansyah (2008: 118-119) adalah (1) Masukan instrumental (*instrumental input*) terutama yang berkaitan dengan kualitas guru atau dosen serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar, dan (2) masukan lingkungan (*environmental input*) terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratis.

Dengan demikian, pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan tidak mengarah pada misi sebagaimana seharusnya. Beberapa indikasi empirik yang menunjukkan salah arah tersebut antara lain; *Pertama*, proses pembelajaran dan penilaian dalam PKn lebih menekankan pada dampak instruksional (*instructional effects*) yang terbatas pada penguasaan materi (*content mastery*) atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitifnya saja sedangkan pengembangan dimensi-dimensi lainnya (*afektif dan psikomotorik*) dan memperoleh dampak pengiring (*nurturant affects*) sebagai "*hidden kurikulum*" belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya. *Kedua*, pengolahan kelas belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa melalui melibatkan secara proaktif dan interaktif baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (intra dan ekstrakurikuler) sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman belajar yang bermakna (*meaningful learning*) untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku siswa atau mahasiswa. *Ketiga*, pelaksanaan kegiatan ekstar- kurikuler sebagai wahana "*hands-on experience*" juga belum memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyeimbangkan anatara

penguasaan teori dan praktek pembiasaan perilaku dan keterampilan dalam kehidupan yang demokratis dan sadar hukum. Oleh karena itu, pembinaan terhadap generasi muda menjadi warganegara yang baik, dapat menjadi perhatian utama. Tidak ada tugas yang lebih penting dari pengembangan warganegara yang bertanggung jawab, efektif dan terdidik. Demokrasi dipelihara oleh warganegara yang mempunyai pengetahuan, kemampuan dan karakter yang dibutuhkan. Tanpa adanya komitmen yang benar dari warganegara terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi, maka masyarakat yang terbuka dan bebas, tak mungkin terwujud. Oleh karena itu, tugas bagi para pendidik, pembuat kebijakan, dan anggota *civil society* lainnya, adalah mengkampanyekan pentingnya pendidikan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat dan semua instansi dan jajaran pemerintahan. Dengan demikian, generasi muda bangsa sebagai subyek pembangunan perlu dibentengi dan dipersiapkan sedini mungkin agar mereka mampu bangkit menjadi generasi muda yang dapat memecahkan berbagai permasalahan kompleks yang dihadapinya serta mampu memperbaiki nilai-nilai karakter bangsa yang hampir terpuruk dan hilang jati dirinya. Menata masa depan bangsa ke arah yang lebih baik perlu dilakukan dan didisain melalui pembinaan karakter generasi muda guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka memperkuat ketahanan nasional. Menurut Hasan (2010) bahwa pembinaan karakter generasi muda dapat ditempuh melalui berbagai upaya termasuk melalui upaya pendidikan dan demokrasi yang dilakukan secara terprogram, bertahap dan berkesinambungan. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) telah merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dari bunyi pasal tersebut terdapat 5 dari 8 potensi peserta didik yang implementasinya lekat dengan tujuan pembentukan pendidikan karakter. Oleh karena itu rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut harus menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan karakter bangsa. Atas dasar pemikiran tersebut diatas, pengembangan pendidikan karakter sangat strategis bagi keberlangsungan dan keunggulan generasi muda di masyarakat dan bangsa di masa kini dan masa mendatang..

METODE

Sumber data dalam penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok. *Pertama*, sumber informan (*human resources*) sebagai sumber primer yang dipilih berdasarkan kedekatan dan pengetahuan informan dengan peristiwa konflik yang berlangsung dari berbagai kalangan. Untuk sebuah studi kasus, kriteria informan yang baik adalah "*all individuals studied represent people who have experienced the phenomenon*" Creswell, (1998: 118). Jadi peneliti lebih memilih informan yang benar-benar memiliki pengalaman dan dia mampu mengartikulasikan pengalaman dan pandangannya tentang sesuatu yang dipertanyakan. Informan yang terpilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Para pelaku konflik, mereka yang menyaksikan peristiwa konflik, dan mereka yang terlibat dalam penyusunan resolusi konflik sosial, baik yang bertempat tinggal di kota Ambon maupun di luarnya.
2. Sejumlah ulama, pendeta, pemimpin organisasi Islam (NU, Muhammadiyah, PUI), pemimpin Jemaat PGI, GPM, USKUP Amboina, dan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh pemuda baik Islam maupun Keristen di Ambon.
3. Sejumlah pejabat birokrasi pada pemerintah Kota Ambon, dan para aparat pemerintah Desa dan Kelurahan termasuk ketua RT dan RW.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat penelitian di SMA Negeri 9 kota Ambon Provinsi Maluku. Letaknya di gunung Nania atas desa Waiheru jarak dari pusat kota 14 km. Serta waktu yang ditempuh selama 1 bulan di kota Ambon tepat di SMA Negeri 9 Nania Air Salak kota Ambon.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara dan teknik yang berasal dari berbagai sumber baik manusia maupun bukan manusia. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan

data dan informasi yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif, yang meliputi observasi, studi wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Pengambilan data dilakukan dengan metode *snowball* sampling dengan proses jumlah kecil informan kemudian melibatkan pihak yang terkait dengan informan awal untuk dijadikan informan dan seterusnya sehingga menjadi besar seperti bola salju (*snowball*). Untuk menggali informasi dari sumber data yang dipilih digunakan sejumlah teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.

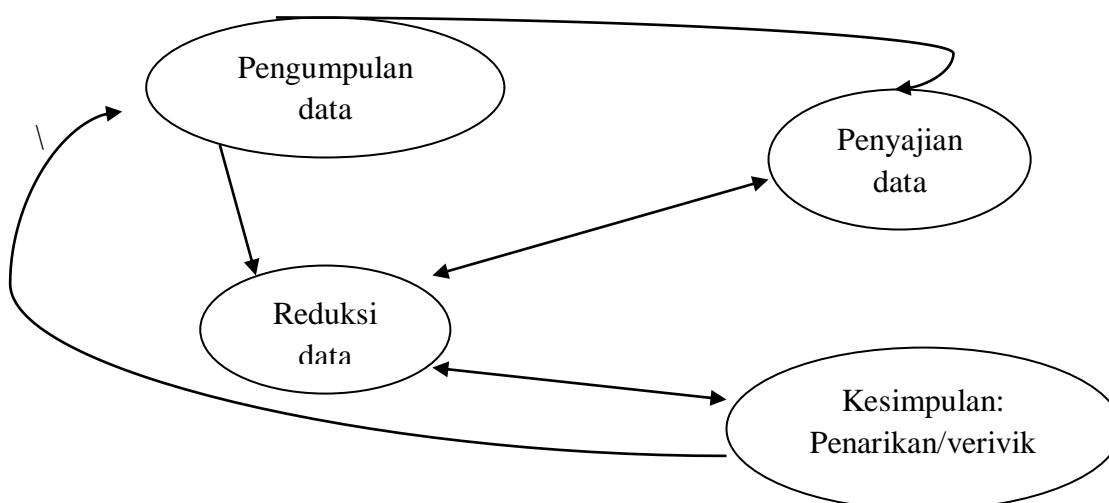
Analisa data menurut Bogdan dan Biklen (1982: 145) adalah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis terhadap transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman tentang data serta menyajikan apa yang telah ditemukan kepada orang lain. dalam penelitian kualitatif-induktif, analisis data dilakukan dengan mencari korelasi antara satu fakta dengan yang lain untuk menemukan pengertian dan makna yang lebih tepat karena pada dasarnya fakta-fakta itu cenderung berserak dan fragmentaris. Identifikasi bagian-bagian, memahami relasi antara bagian, memahami hubungan bagian dengan keseluruhan, dan mengungkapkannya merupakan kegiatan yang paling penting dalam analisis ini, termasuk di dalamnya melakukan interpretasi dan pemaknaan.

Secara umum, untuk analisis data penelitian ini, peneliti melakukan tiga alur kegiatan yang dapat dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data kualitatif disederhanakan dan ditransformasikan dengan aneka macam cara, antara lain seleksi yang ketat, ringkasan atau uraian singkat, penggolongan dalam suatu pola yang lebih luas (Miles & Huberman, 1992: 16-19).

Penyajian data adalah susunan sekumpulan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti berupaya menggunakan cara yang menggunakan naratif teks, bagan, dan grafik teks. Analisis data kualitatif mulai dengan mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Peneliti akan menarik kesimpulan-kesimpulan secara longgar, tetap terbuka dan skeptis namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan tersebut diverifikasi selama proses penelitian. Verifikasi tersebut berupa tinjauan atau pemikiran kembali pada catatan lapangan, yang mungkin berlangsung sekilas atau malah dilakukan secara seksama dan memakan waktu lama, serta bertukar pikiran para responden untuk mengembangkan intersubjekif. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, sehingga membentuk validitasnya (Miles & Huberman, 1992: 19).

Proses analisis data sebagaimana terurai di atas, digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 1. Komponen-komponen analisis data
(Miles & Huberman, 1992: 20)

Selanjutnya, karena penelitian ini merupakan penelitian fenomenologi, maka alur analisis data mengikuti apa yang disampaikan Creswell (1998: 147-150) sebagai berikut:

1. Peneliti memulai dengan mendeskripsikan secara menyeluruh pengalamannya.
2. Peneliti kemudian menemukan pernyataan (dalam wawancara) tentang bagaimana orang-orang memahami topik, rinci pernyataan-pernyataan tersebut (horisonalisasi data) dan perlakuan setiap pernyataan memiliki nilai yang setara, serta kembangkan rincian tersebut dengan tidak melakukan pengulangan atau tumpang tindih.
3. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam unit-unit bermakna (*meaning unit*), peneliti merinci unit-unit tersebut dan menuliskan sebuah penjelasan teks (*textual description*) tentang pengalamannya, termasuk contoh-contoh secara saksama.
4. Peneliti kemudian merepleksikan pemikirannya yang menggunakan variasi imajinatif (*imaginative variation*) atau deskripsi struktural (*structural description*), mencari keseluruhan makna yang dan melalui perspektif yang divergen (*divergent perspectives*), mempertimbangkan kerangka rujukan atas gejala (*phenomenon*), dan menkonstruksi bagaimana gejala tersebut dialami.
5. Peneliti kemudian menkonstruksikan seluruh penjelasan tentang makna dan esensi (*essence*) pengalamannya.
6. Proses tersebut merupakan langkah awal peneliti mengungkapkan pengalamannya, dan kemudian diikuti pengalaman seluruh partisipan. Setelah semua itu dilakukan, kemudian tulislah deskripsi gabungannya (*composite description*).

Alur penelitian diskemakan sebagai berikut:

Studi Pendahuluan

Muatan dan Implementasi Pendidikan Karakter, Generasi Muda Pasca
Konflik Sosial Ambon Peran PKn

Studi Dokumen
Wawancara

Pendidikan Karakter
Generasi Muda

*Explanatory/
Penomenolog*

Obsevasi
Wawancara

Pelaksanaan Pendidikan
Karakter Generasi Muda di
Ambon

*Logical
Construct*

Studi
Dokumentasi
Wawancara

Rumusan Karakter Generasi
muda dan Nilai-Nilai
Demokrasi dalam Resolusi
Konflik Sosial

Validasi
Pakar

Pendidikan Karakter Generasi Muda dan
Peran PKn untuk mengatasi Konflik
Sosial di Ambon

Unit Analisis Karakter Generasi Muda dan
Peran PKn

Informan : Pakar, Guru, PKn,
Tokoh Masyarakat, Pokoh Pemuda, Orang Tua

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan generasi muda untuk meningkatkan sumber daya manusia, (karakter moral, spiritual intelektual dan keterampilan) seharusnya diprioritaskan, (karena SDM berkualitas ini merupakan prasyarat) namun, sangat kurang mendapat perhatian. Sebaliknya, walaupun ada perhatian dari pemerintah daerah, maka hal ini sangat berkaitan dengan prinsip kekeluargaan. Sistem semacam ini akan menimbulkan kecemburuan atau penyesalan warga masyarakat kota Ambon atau masyarakat Maluku secara umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat kota Ambon peneliti dapat memperoleh sejumlah temuan bahwa tokoh masyarakat juga merasa perlu adanya pembinaan karakter generasi muda pasca konflik sosial di Ambon melalui PKn di sekolah. Oleh karena itu pembinaan karakter generasi muda pasca konflik di sekolah harus dilakukan secara sungguh-sungguh terhadap perilaku kehidupan siswa atau generasi muda maupun masyarakat karena diawal pasca konflik sosial ambon masyarakat dan generasi muda rasa membayangkan bayangi saat terjadi konflik sehingga perilaku generasi muda Ambon masih jauh dari apa yang kita inginkan. Program pembinaan karakter generasi muda yang diselenggarakan di lembaga pendidikan formal melalui pembelajaran PKn kadang kurang efektif merubah pola pikir generasi muda Ambon ke arah yang lebih baik, seperti yang dikatakan oleh tokoh masyarakat (ERL, 44 tahun, Desa Waiyame) menyatakan bahwa:

Pembinaan karakter generasi muda melalui Pembelajaran PKn di sekolah belum dapat dikatakan berhasil karena akibat masih ada sisa-sisa konflik yang tertanam dibenak generasi muda, ketika siswa itu keluar dari lingkungan sekolah ke lingkungan masyarakat maka terpengaruh kepada hal-hal yang kurang disukai oleh masyarakat seperti siswa senang berkelahi, menegeluarkan kata-kata yang tidak sopan, sering mabuk-mabukan ketika ada masalah tidak diselesaikan secara damai atau melalui jalur hukum akan tetapi justru siswa atau generasi muda pasca konflik di Ambon lebih senang main hakim sendiri/bebas dari pada diatur.

Lebih lanjut dapat dikatakan Peneliti bahwa; Dampak dari konflik sosial di Ambon akan mengakibatkan timbulnya sifat karakter kekerasan pada generasi muda kota Ambon dan Maluku secara umum. Dilihat dari gejala pemuda Ambon di atas, maka lebih lanjut peneliti dapat mengatakan bahwa: Sebetulnya pasca konflik di Ambon sebagai generasi muda Ambon, rasa punya itikad baik untuk meninggalkan sikap-sikap yang muda dipropokasi oleh orang lain. Akan tetapi para generasi muda maupun masyarakat di Ambon seharusnya mencari jalan keluar guna menemukan solusi khususnya di bidang pendidikan yang akan merubah karakter generasi muda Ambon ini menjadi Ambon baru dengan kotanya "*Ambon Manise*", seperti yang dikatakan oleh tokoh masyarakat (Dekosta 44 tahun Desa Waiyame) tokoh masyarakat ini wakil dari tim pemersatu adat/budaya Kota Ambon mengatakan bahwa:

"Kita butuh manusia atau generasi baru pasca konflik Ambon-Maluku yang menghormati mengindahkan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan dengan cara berpikrnya seperti seorang negarawan artinya generasi yang punya itikad baik dan pola pikir yang baru guna membangun masa depan negeri Maluku yang lebih berkarakter sehingga julukan Ambon manise selalu melekat di hati masyarakat orang Ambon serta berperilaku baik, berbudi luhur, bermoral, rasa kesadaran kemanusiaan yang tinggi.

Dalam program PKn itu sendiri diupayakan untuk mendidik generasi muda pasca konflik agar benar-benar menjadi warga negara yang baik dan generasi muda yang mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri, atau masalah lingkungannya. Mengapa demikian, karena generasi muda atau warga negara Indonesia di Ambon bisa menyelesaikan masalahnya sendiri melalui musyawarah dengan pendekatan kekeluargaan (demokrasi), itu lebih baik dari pada menyelesaikan masalah dengan cara-cara kekerasan.

Sistem pendidikan di Maluku menurut salah satu guru PKn (Mampo, 35 tahun Desa Batu Merah) mengatakan bahwa :

Salah satu cara yang digunakan dalam rangka merekrut dan membina karakter para generasi muda Ambon pasca konflik sosial satu-satunya adalah melalui pendidikan berdasarkan kearifan lokal seperti panas *Pela* (Hidupkan Kembali Budaya Orang Bersaudara). Diantaranya budaya *pela gandong*, *masohi*, *makan patita*, *ale rasa beta rasa*, *potong di kuku rasa di daging*, dan

laeng lia laeng, laeng sayang laeng, laeng kalesang laeng Supaya katong orang tua dan anak-anak muda kita di Maluku tidak muda di propokasi oleh orang lain dari luar Maluku, karena mungkin orang dari luar Maluku tidak suka kalau katong orang Maluku hidup maju sebagai orang basudara.

Dengan demikian atas dasar pikiran tersebut, jelas, sejalan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, diarahkan kepada pembentukan manusia Indonesia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan berkepribadian tinggi. Menurut hasil temuan lapangan bahwa Dalam kaitannya sebenarnya ada nilai-nilai ajaran moral yang lebih luhur berasal dari ajaran samawi, diturunkan dalam kemasan yang lengkap dan sempurna. Nilai-nilai yang diajarkan tiada lain diantaranya nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama.

Jika pihak sekolah berupaya untuk mencermati, nilai-nilai itu dan mencari solusi terhadap pembinaan akan lebih penting dalam rangka membangkitkan rasa nasionalisme, penanaman etika kepada siswa demi kehidupan bersama, termasuk berbangsa dan bernegara, pemahaman hak asasi secara benar, menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak, serta pengembangan sensitivitas atau kepedulian sosial dan lingkungan, semuanya adalah unsur sekolah yang implementasinya adalah pembelajaran PKn di sekolah.

Berkaitan dengan hasil penelitian di atas maka pembinaan karakter pada hakikatnya ingin membentuk individu menjadi seorang pribadi bermoral yang dapat menghayati kebebasan dan tanggung jawab, terutama pembelajaran PKn di sekolah sangat diperlukan dan memiliki nilai serta kedudukan yang sangat strategis bagi *'national character building'* dalam arti seluas-luasnya terutama dalam membentuk warga negara yang baik. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, PKn sebagai wahana pembangunan watak anak bangsa berdasarkan konstitusi seperti yang dibuktikan oleh sejumlah hasil penelitian para ahli *Civic Education* seperti dikemukakan Cogen (1998: 5) sebagai berikut:

It (citizenship education) has also often reflected the interests of those in power in a particular society and thus has been a matter of indoctrination and the establishment of ideological hegemony rather than of education.

Dalam rangkai pembinaan karakter generasi muda di sekolah maka dapat dikaitkan dengan lembaga formal pemerintah yang merupakan sarana pembinaan siswa termasuk generasi muda dalam UU No 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II, tertuang penegasan fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak sehingga kedepan, peran guru sebagai tenaga pendidik mempunyai tanggung jawab besar dalam pembentukan karakter anak didik. Mengenai pembinaan peserta didik di sekolah berdasarkan temuan lapangan bahwa: yang selalu berhadapan secara terprogram dengan peserta didik adalah guru oleh karena itu, setiap pendidik profesional, dipersyaratkan memiliki kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Yang bertujuan untuk membina karakter generasi muda pasca konflik Ambon.

Berkaitan dengan masalah di atas dilain pihak menurut peneliti ada empat pilar Unesco yang merupakan kemampuan belajar yang diharapkan dimiliki oleh semua warga dunia agar mampu hidup secara layak pada era globalisasi, adalah *learning to know, learning to do, learning to be dan learning together*. Tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan, termasuk pendidikan tinggi seyogyanya mempunyai tanggung jawab yang tidak kalah pentingnya dalam membangun karakter generasi muda bangsa terutama di Maluku pasca konflik sosial. "Upaya pembinaan karakter generasi muda kota Ambon pasca konflik sosial bukan merupakan fokus sesaat, tetapi harus dilakukan secara terus menerus dari sekolah terutama melalui pembelajaran PKn.

Berkaitan dengan pembentukan karakter generasi muda yang bermoral dan solusinya di sekolah menurut Winataputra (2001: 307-309) menyatakan bahwa rana-rana tersebut ada pada sekolah dan dijalankan sepenuhnya di pembelajaran PKn. dan dikemas dalam berbagai lebel kompetensi atau kemampuan dan atau kepribadian warga negara atau generasi muda, hal ini lebih lanjut dapat dikatakan kompetensi PKn direkonseptualisasi menjadi pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan berdemokrasi dan berpikir kritis/reflektif, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan membuat keputusan bernalar, dan keterampilan sosial. Sedangkan aspek kepribadian warga negara yang perlu dikembangkan terutama adalah tentang keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Ynag Maha Esa yang

meliputi kecerdasan berpikir dan berbuat serta emosional sebagai warga negara (seperti; kepekaan sosial, cinta tanah air, tertib, memiliki integritas partisipatif, berperadaban/akhlak mulia, kepercayaan diri, komitmen terhadap kehidupan berdemokrasi, dan tanggung jawab sebagai warga negara atau (*socio civic responsibility*)).

Sejalan dengan penilaian tersebut Wahab (1999) mengemukakan beberapa kelemahan yang ada pada PKn yang di masa yang lalu, (1) Terlalu menekankan pada aspek nilai moral yang menempatkan siswa sebagai objek yang berkewajiban untuk menerima nilai-nilai moral tertentu; (2) Kurang diarahkan pada pemahaman struktur, proses, dan institusi-institusi negara dengan segala kelengkapannya; (3) Pada umumnya bersifat dogmatis dan relatif; dan (4) Berorientasi pada kepentingan penguasa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan sejumlah temuan penelitian yang telah diuraikan di atas tampak bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam pembentukan karakter generasi muda pasca konflik sosial di Ambon. Hal tersebut dikarenakan: a) PKn yang dilaksanakan dipersekolahan tidak hanya menitikberatkan pada penguasaan materi pembelajaran secara kognitif saja, tetapi meliputi pula pada pembentukan sikap karakter selaku generasi muda terutama siswa. Dengan kata lain, paradigma pembelajaran PKn sudah mulai berubah dari *education about democracy* ke arah *education for democracy*; b) Pembelajaran PKn sudah dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran yang tidak bersifat persekolahan saja akan tetapi PKn bisa dilakukan antara masyarakat organisasi sosial politik, organisasi kepemudaan dan keluarga, sehingga PKn lebih terdorong penguatan peran dan kedudukannya sebagai pendidikan karakter dan kesadaran berdemokrasi bagi generasi muda terutama siswa; dan c) Materi pembelajaran PKn pada dasarnya mengikuti prinsip dimana kurikulum ditekankan.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang diusulkan sebagai berikut:

1. Kepada pihak pemerintah, tentunya materi dan metode pembelajaran PKn sangat relevan dalam meningkatkan kualitas cara berpikir siswa yang lebih demokratis atau yang disebut dengan sumber daya manusia di lingkungan sekolah, maupun di masyarakat bahkan di lembaga-lembaga pemerintah sehingga dapat mengetahui sikap demokrasi dan rasa persatuan dalam kehidupan bernegara, Hal ini tentunya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan pemerintahan yang *Good gavernants*.
2. Kepada guru PKn diharapkan terus secara konsisten melakukan kegiatan dengan meningkatkan kualitas materi kewarganegaraan dengan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga kegiatan lebih menarik guru PKn lakukan kerja sama dengan sekolah lain atau guru PKn lain yang memiliki visi yang sama sehingga dapat saling membantu dan bertukar pikiran dalam menjalankan aktivitas sebagai tenaga pengajar.
3. Dengan jumlah guru PKn yang begitu banyak di Kota Ambon tentunya hal ini melahirkan potensi yang cukup memuaskan untuk melakukan sebuah perubahan dengan membina kembali karakter generasi muda melalui PKn, hal ini bisa terwujud tentu mengoptimalkan peran dan fungsi guru sebagai tenaga pengajar.
4. Kepada pihak sekolah diharapkan secara terprogram melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan karakter generasi muda terutama siswa sehingga benar-benar lembaga sekolah melaksanakan visi dan misi guna melahirkan generasi yang bermoral dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Budimansya, Dasim dan Suryadi, Karim. 2008. *PKN dan Masyarakat Multikultural*, Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Cogan, Jhon J. 1998. *Developing The Civil Society: The Role Of Civic Education*. (paper). Presented In The Conference On Civic Education For Civil Society, Organized by Cived In Collaboration With Visis. Bandung : Hotella Papandaya, Maret 16-17, 1999

- Cogan, Jhon J. dan Derricot, R. 1998. *Citizenship for the 21 Century: An International Perspeltive an Education*. London: Cogan Page.
- Creswell, W, Jhon. 1998. *Qualitative Inquiry And Research Desing: Choosing Among Five Traditions: London : SAGE Publications*.
- Dean G. Pruit, dan Jeffrey Z. Rubin. 2004. *Social Conflict Escalation, Stalemate, and Settlemen*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- E, Lion. 2014. *Problem dan Prospek Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Berkeadaban*. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS). Vol 1 Nomor 1 Hal. 63-71.
- Eli Karliani dan Offeny Ibrahim. 2014. *Analisis Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan dan Pembentukan Sikap Nasionalisme (Studi komparatif pada mahasiswa Universitas Palangka Raya dengan mahasiswa Akademi Keperawatan)*. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS). Vol 1 Nomor 1 Hal. 1-14.
- E, Lion. 2015. *Dampak Penyanangan Pornografi Dan Kekerasan Di Multimedia Bagi Perkembangan Dan Perilaku Anak*. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS). Vol 3 Nomor 2 Hal. 257-270.
- Maftuh Bunyamin. 2005. *Implementasi Model Pembelajaran Resolusi Konflik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas*. Bandung : Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UPI- Press : Jakarta.
- Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Rinto, Alexandro. 2013. *Kebijakan Pemerintah Pada perkembangan Agribisnis Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah*. Journal Ilmu Sosial, Politik dan Ilmu Pemerintahan. Vol 2 Nomor 1 Hal. 1-13.
- S, Sakman. 2015. *Peran Strategis PKn Dalam Membangun Budaya Hukum Yang Berkeadaban*. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS). Vol 3 Nomor 2 Hal. 245-256.
- S, Sakman. 2016. *Peran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi Dalam Mencegah Degradasi Moral*. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS). Vol 6 Nomor 2.
- Wahab, A. azis. 1999. *Pembelajaran Konsep dan Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Baru Indonesia Bagi Terbinanya Warga Negara Multidimensional (Paper)*, disampaikan Dalam Worskop On Civic Education Content Mapping Oktober, 18-19 1991 Hotel Papandayan, Bandung: Ciced.
- Wahab, A. Azis. 1996. *Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik: Model Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Menuju Warganegara Global*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada IKIP Bandung.
- Winataputra Udin dan Budimansyah Dasim. 2007. *Civic Education, Konteks dan Landasan Bahan Ajar dan Kultur kelas*, Bandung Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia

Winataputra, Udin S. 1999. *Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi di Indonesia*. Paper disampaikan pada Workshop on the Development of Concepts and Content of Civic Education for Indonesian Schools. 16-19 Oktober 1999 di Bandung.